

## DAFTAR SINGKATAN

1. **APBD** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. **APBN** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. **APB-Desa** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
4. **BKAD** : Badan Kerjasama Antar Desa
5. **BASPK** : Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan
6. **BPD** : Badan Permusyawaratan Desa
7. **DPRD** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. **FK** : Fasilitator Kecamatan
9. **FT** : Fasilitator Teknik
10. **Kades** : Kepala Desa
11. **KPMD** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
12. **LPMD** : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
13. **MMDD** : Membangun Masa Depan Desa
14. **Musdes** : Musyawarah Desa
15. **Musrenbang** : Musyawarah Rencana Pembangunan
16. **Musrenbangdes** : Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
17. **Musrenbang Kec.** : Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan
18. **Perda** : Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
19. **Perdes** : Peraturan Desa
20. **PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN** : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
21. **PJOK** : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
22. **PjOKab** : Penanggung Jawab Operasional Kabupaten
23. **PKD** : Pengkajian Keadaan Desa
24. **PNPM-MPd** : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
25. **PNPM-MP** : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
26. **RKPD** : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
27. **RKP-Desa** : Rencana Kerja Pembangunan Desa
28. **RKTL** : Rencana Kerja Tindak Lanjut
29. **RPJM** : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
30. **RPJM-Desa** : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
31. **SDM** : Sumber Daya Manusia
32. **Sekda** : Sekretariat Daerah
33. **RBM** : Ruang Belajar Masyarakat
34. **TA** : Tahun Anggaran
35. **TPK** : Tim Pengelola Kegiatan
36. **TPM** : Tim Pelatih Masyarakat
37. **TV** : Tim Verifikasi
38. **UPK** : Unit Pengelola Kegiatan

## DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>Naskah Peraturan Bupati Bulungan Nomor 09 Tahun 2014</b> .....	1-5
<b>Lampiran</b> .....	1-52
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Pengertian .....	5
1.4. Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional .....	7
<b>BAB II KEBIJAKAN PNPM-MPd INTEGRASI SPP-SPPN</b> .....	8
2.1. Konsep Pengelolaan Pembangunan Partisipatif .....	8
2.1.1. Ranah Pengintegrasian .....	9
2.1.2. Unsur-unsur yang di Integrasikan .....	12
2.2. Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Partisipatif .....	12
2.2.1. Tujuan .....	12
2.2.2. Prinsip-prinsip Pengelolaan .....	13
2.2.3. Kerangka Kerja .....	14
2.2.4. Strategi .....	14
2.2.5. Sasaran .....	15
2.2.6. Ketentuan Dasar .....	15
<b>BAB III PENGELOLAAN KEGIATAN</b> .....	19
3.1. Jenis Kegiatan .....	19
3.1.1. Kegiatan Penintegrasian .....	20
3.1.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas .....	20
3.2. Hasil.....	20
3.3. Tahapan Pengintegrasian .....	20
<b>BAB IV PENDANAAN</b> .....	25
4.1. Sumber Dana .....	25
4.2. Peruntukan Dana .....	25
4.3. Mekanisme Penyaluran Dana .....	25
<b>BAB V ORGANISASI PELAKSANA</b> .....	27
5.1. Organisasi Pelaksana .....	27
5.2. Tugas dan Tanggungjawab Pelaku .....	28
5.3. Organisasi Pendukung .....	38
<b>BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN</b> .....	39
6.1. Pengendalian .....	39
6.2. Pemantauan .....	39
6.2.1. Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat .....	40
6.2.2. Pemantauan oleh Pemerintah .....	40
6.2.3. Pemantauan oleh Pihak Lain .....	40
6.3. Pelaporan .....	41
6.3.1. Pelaporan Jalur Struktural .....	41
6.3.2. Pelaporan Jalur Fungsional .....	42
6.4. Evaluasi .....	43
6.5. Pengaduan dan Penanganan Masalah .....	43
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	45
<b>LAMPIRAN :</b>	
PENJELASAN 1 RUANG LINGKUP KEGIATAN PNPM-MPd INTEGRASI SPP-SPPN .....	46
PENJELASAN 2 TAHAPAN DAN JADUAL KEGIATAN .....	49

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Rahmat dan Hidayah Nyalah, sehingga penyusunan Petunjuk Teknis Operasional ini dapat diselesaikan.

Petunjuk Teknis Operasional ini merupakan pedoman dasar dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan program perencanaan pembangunan partisipatif melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan / Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PNPM-MPd/Integrasi SPP-SPPN) di Kabupaten Bulungan.

Adapun mekanisme pembangunan partisipatif yang dilaksanakan selama ini, dimulai dari perencanaan yang secara sistematis dari bawah. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaksana (*subyek pembangunan*). Namun pada kenyataannya, proses perencanaan yang berasal dari bawah tersebut masih belum berjalan sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh masih dominannya pendekatan “*top down*” dalam pembangunan. Oleh karena itu dengan disusunnya Petunjuk Teknis Operasional ini diharapkan dapat menunjang percepatan dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Bulungan.

Pada sisi lain, Desa sebagai unit perencanaan pembangunan terendah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui berbagai program kegiatan digunakan sebagai wilayah operasi, diluar kegiatan perencanaan regular tahunan pemerintah melalui Musrenbang. Sehingga hal ini terjadi pengulangan berbagai kegiatan yang dapat menyita waktu, bahkan terdapat berbagai kasus, yang sangat membingungkan masyarakat, karena setiap program kegiatan yang masuk ke Desa membawa tata cara dan prosedurnya masing-masing.

Dalam konteks ini masalah yang lebih serius untuk mendapatkan perhatian adalah tidak efektifnya hasil dari proses perencanaan dimaksud. Secara realistis proses perencanaan yang dilakukan hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan usulan sesuai ketentuan program.

Atas dasar praktek pelaksanaan tersebut di atas, perlu dilakukan upaya untuk mengefektifkan proses maupun hasil dari perencanaan. Kondisi tersebut, diyakini dapat dicapai apabila dilakukan upaya pengintegrasian, yaitu dengan cara penyatupaduan proses perencanaan program pembangunan partisipatif ke dalam proses regular melalui musrenbang dengan berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Disadari bahwa apa yang telah disusun ini belumlah maksimal sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian hal tersebut merupakan tanggungjawab kita bersama, oleh karena itu saran dan masukannya sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk dimasa yang akan datang agar dapat lebih baik.

Akhirnya semoga Petunjuk Teknis Operasional ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kita kerjakan mendapatkan Rahmat dan Ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulungan yang maju, adil dan sejahtera, terima kasih.

**BUPATI BULUNGAN,**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

**BUDIMAN ARIFIN**

SULISTIA WIDARTI, SH

Pembina / IV A

Nip.196509031998032001